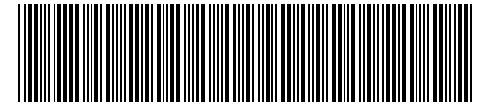




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 063.01.1.445155/2025**



DS:7350-5336-1020-2760

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 13

Tanggal : 15 Januari 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 2. Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 4. Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
- Sebesar : Rp. 50.970.608.000 (LIMA PULUH MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH JUTA ENAM RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 07 KESEHATAN
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	37.252.818.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	13.606.657.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	111.133.000
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	111.133.000
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					
1. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	111.133.000	2. KPPN JAKARTA VI	(175) Rp.	50.859.475.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:7350-5336-1020-2760

Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	50.970.608.000
DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp.	3.372.685.000
DR.4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Rp.	6.749.931.000
DR.4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Rp.	11.233.674.000
DR.4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Rp.	9.310.689.000
DR.4127	Registrasi Obat	Rp.	12.654.921.000
DR.4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Rp.	7.648.708.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I A. 1

Program	: 063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	50.970.608.000
Kegiatan	: 3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3.372.685.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	
	: 2. 01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	
	: 3. 01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	
	: 4. 01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
	: 5. 01	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
	: 6. 01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	
	: 7. 02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	
	: 8. 02	Tingkat efektivitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
	: 9. 03	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
	: 10. 03	Tingkat efektivitas KIE Pangan Olahan	
	: 11. 04	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	
	: 12. 04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	
	: 13. 05	Jumlah desa pangan aman	
	: 14. 05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
	: 15. 06	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	
	: 16. 06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	
	: 17. 07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
	: 18. 08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
	: 19. 09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
	: 20. 10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
	: 21. 11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

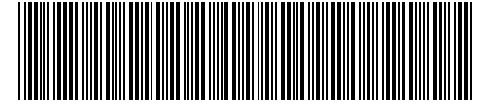
Halaman : I A. 2

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

- 22. 12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar
- 23. 13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- 24. 14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- 25. 15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- 26. 16 Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Klasifikasi Rincian Output 1	:	3165.BKB	Pemantauan produk	1,00	laporan	3.372.685.000
Rincian Output	:	01 BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	laporan	3.372.685.000
Kegiatan	:	4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor			6.749.931.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan			
		2. 01	Persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu			
		3. 02	Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor			
		4. 02	Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan			
		5. 03	Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai			
		6. 03	Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4122.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	10,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.305.000.000
Rincian Output	:	01 ABG.001	Kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan	10,00	Rekomendasi Kebijakan	2.305.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4122.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	960,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	781.046.000
Rincian Output		:	01	QAH.001 Keputusan Penilaian Fasilitas Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	960,00	dokumen	781.046.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4122.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	167,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	3.663.885.000
Rincian Output		:	01	QIC.001 Keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan	167,00	Keputusan	3.663.885.000
Kegiatan		:	4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif			11.233.674.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor ONPPZA			
		:	2. 01	Persentase hasil pengawasan mutu ONPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan			
		:	3. 02	Persentase Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat; Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; dan Certificate of Pharmaceutical Product (CPP) yang Diselesaikan Tepat Waktu			
		:	4. 02	Persentase hasil pengawasan keamanan, mutu, dan informasi Obat dan NAPPZA oleh UPT BPOM yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan			
		:	5. 03	Persentase laporan pengawasan iklan dan penandaan obat NPP yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan			
		:	6. 03	Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu			
		:	7. 04	Persentase pelaku usaha produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang melaporkan informasi produk sesuai ketentuan			
		:	8. 05	Persentase laporan pengawasan produk tembakau yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan			
		:	9. 06	Jumlah tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4123.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	24.000,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	745.526.000
Rincian Output		:	01	BAH.001 Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat ; Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dan Certificate of Pharmaceutical Product serta Persetujuan Iklan Obat Sebelum Beredar yang Diselesaikan Tepat Waktu	24000,00	dokumen	745.526.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

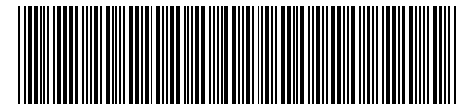
Halaman : I A. 4

Pelayanan Publik Lainnya

layanannya, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4123.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1.500,00	Produk, Laporan, Keputusan	2.420.284.000
Rincian Output		:	01 BIA.001	Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan	140,00	Laporan	1.648.272.000
		:	02 BIA.002	Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan	1360,00	Laporan	772.012.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4123.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	10,00	Orang, Laporan	2.428.390.000
Rincian Output		:	01 BIB.001	Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan	10,00	Laporan	2.428.390.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4123.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	6.012,00	Produk, Laporan, Keputusan	5.639.474.000
Rincian Output		:	01 QIA.001	Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang memenuhi Ketentuan	6000,00	Produk	1.117.647.000
		:	02 QIA.002	Laporan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan	12,00	Laporan	4.521.827.000
Kegiatan		:	4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor			9.310.689.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase Industri Farmasi yang dievaluasi sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan level maturitas			
		:	2. 01	Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu			
		:	3. 01	Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB			
		:	4. 02	Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor			
		:	5. 02	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi Obat dan NPP oleh UPT sesuai ketentuan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I A. 5

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

- 6. 03 Persentase Penilaian Hasil Pengawasan Kemandirian UPT Baru
- 7. 04 Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk highrisk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar

Klasifikasi Rincian Output	9	:	4125.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	22,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	4.568.207.000
Rincian Output		:	01 BAH.001	Keputusan Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan	17,00	layanan	2.068.207.000
			02 BAH.002	Jumlah UPT Baru yang mandiri dalam inspeksi CPOB untuk Pemenuhan Standar PIC/s dan WHO	5,00	layanan	2.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4125.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	84,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	2.634.795.000
Rincian Output		:	01 QAH.001	Keputusan Penilaian Fasilitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	84,00	layanan	2.634.795.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4125.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	150,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	2.107.687.000
Rincian Output		:	01 QIC.001	Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	150,00	Lembaga	2.107.687.000
Kegiatan		:	4127	Registrasi Obat			12.654.921.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat			
			2. 01	Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan			
Klasifikasi Rincian Output	12	:	4127.ACA	Perizinan Produk	1,00	Produk, Keputusan	1.000.000.000
Rincian Output		:	01 ACA.001	Pengawasan obat pengembangan baru yang sesuai standar	1,00	Keputusan	1.000.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I A. 6

Klasifikasi Rincian Output	13	:	4127.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	4.000.000.000
Rincian Output		:	01	BAH.001 Layanan Publik Registrasi Obat yang Prima	1,00	layanan	4.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	4127.PCA	Perizinan Produk	13.000,00	Produk, Keputusan	7.654.921.000
Rincian Output		:	01	PCA.001 Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	13000,00	Keputusan	7.654.921.000
Kegiatan		:	4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif			7.648.708.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase Standar Obat, NPPZA yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan			
Klasifikasi Rincian Output	15	:	4131.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	50,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.872.271.000
Rincian Output		:	01	ABG.001 Rekomendasi Kebijakan Produksi, Distribusi, Khasiat, Keamanan dan Mutu Obat yang diselesaikan	50,00	Rekomendasi Kebijakan	2.872.271.000
Klasifikasi Rincian Output	16	:	4131.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.316.786.000
Rincian Output		:	01	AFA.001 Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun	8,00	NSPK	3.316.786.000
Klasifikasi Rincian Output	17	:	4131.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	100,00	Orang	27.050.000
Rincian Output		:	01	BDC.001 Layanan Sosialisasi	100,00	Orang	27.050.000
Klasifikasi Rincian Output	18	:	4131.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	3,00	Paket, Unit	34.933.000
Rincian Output		:	01	CAB.001 Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3,00	Unit	34.933.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I A. 7

Sarana Bidang Kesehatan

Paket, Unit

Klasifikasi Rincian Output	19	:	4131.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	55,00	Unit	1.397.668.000	
Rincian Output		:	01	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	55.00	Unit	1.397.668.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



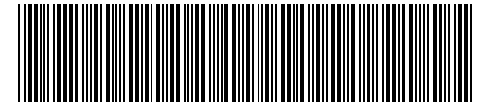
DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	-	49.378.007	1.592.601	-	-	50.970.608		
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	-	49.378.007	1.592.601	-	-	50.970.608		
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	-	3.372.685	-	-	-	3.372.685		
3165.BKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.372.685	-	-	-	3.372.685	01 . 51	
01	RM	-	2.531.353	-	-	-	2.531.353	175@	
04	PNBP	-	841.332	-	-	-	841.332	175@	
4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan	-	6.649.931	100.000	-	-	6.749.931		
4122.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.305.000	-	-	-	2.305.000	01 . 51	
01	RM	-	2.305.000	-	-	-	2.305.000	175@	
4122.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	681.046	100.000	-	-	781.046	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	222.921	-	-	-	222.921	175	
04 PNBP		-	458.125	100.000	-	-	558.125	175@	
4122.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.663.885	-	-	-	3.663.885	01 . 51	
01 RM		-	2.561.081	-	-	-	2.561.081	175@	
04 PNBP		-	1.102.804	-	-	-	1.102.804	175@	
4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	-	11.173.674	60.000	-	-	11.233.674		
4123.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	745.526	-	-	-	745.526	01 . 51	
01 RM		-	580.319	-	-	-	580.319	175@	
04 PNBP		-	165.207	-	-	-	165.207	175@	
4123.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.420.284	-	-	-	2.420.284	01 . 51	
01 RM		-	1.539.787	-	-	-	1.539.787	175@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNBP		-	880.497	-	-	-	880.497	175@	
4123.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.428.390	-	-	-	2.428.390	01 . 51	
01 RM		-	2.249.687	-	-	-	2.249.687	175@	
04 PNBP		-	178.703	-	-	-	178.703	175@	
4123.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.579.474	60.000	-	-	5.639.474	01 . 51	
01 RM		-	4.621.608	60.000	-	-	4.681.608	175@	
04 PNBP		-	957.866	-	-	-	957.866	175@	
4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	-	9.310.689	-	-	-	9.310.689		
4125.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.568.207	-	-	-	4.568.207	01 . 51	
01 RM		-	3.952.632	-	-	-	3.952.632	175@	
04 PNBP		-	615.575	-	-	-	615.575	175@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



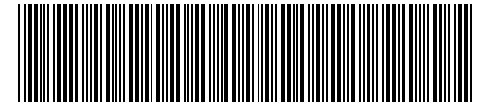
DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4125.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.634.795	-	-	-	2.634.795	01 . 51	
01	RM	-	904.170	-	-	-	904.170	175@	
04	PNBP	-	1.730.625	-	-	-	1.730.625	175@	
4125.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.107.687	-	-	-	2.107.687	01 . 51	
01	RM	-	2.107.687	-	-	-	2.107.687	175@	
4127	Registrasi Obat	-	12.654.921	-	-	-	12.654.921		
4127.ACA	Perizinan Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 51	
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	175@	
4127.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	01 . 51	
01	RM	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	175@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



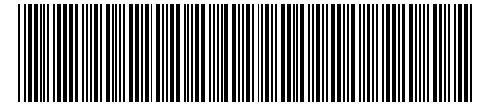
DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4127.PCA	Perizinan Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	7.654.921	-	-	-	7.654.921	01 . 51	
01	RM	-	1.564.586	-	-	-	1.564.586	175@	
04	PNBP	-	6.090.335	-	-	-	6.090.335	175@	
4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	-	6.216.107	1.432.601	-	-	7.648.708		
4131.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.872.271	-	-	-	2.872.271	01 . 51	
01	RM	-	2.865.186	-	-	-	2.865.186	175@	
04	PNBP	-	7.085	-	-	-	7.085	175@	
4131.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.316.786	-	-	-	3.316.786	01 . 51	
01	RM	-	3.205.653	-	-	-	3.205.653	175@	
11	HLL	-	111.133	-	-	-	111.133	140	- 2SRVKB4A

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
Kewenangan : (KP)

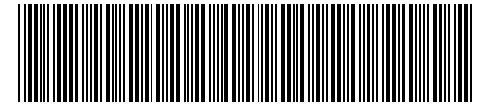
Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4131.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	27.050	-	-	-	27.050	01 . 51	
01	RM	-	27.050	-	-	-	27.050	175	
4131.CAB	Sarana Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	34.933	-	-	34.933	01 . 51	
01	RM	-	-	12.888	-	-	12.888	175@	
04	PNBP	-	-	22.045	-	-	22.045	175@	
4131.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	1.397.668	-	-	1.397.668	01 . 51	
01	RM	-	-	941.210	-	-	941.210	175	
04	PNBP	-	-	456.458	-	-	456.458	175	
JUMLAH		-	49.378.007	1.592.601	-	-	50.970.608		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	503.637	1.267.951	869.006	1.023.055	1.819.556	1.682.872	1.231.212	1.334.015	1.122.209	3.667.067	36.450.029	50.970.608
		BELANJA BARANG	0	503.637	1.267.951	868.825	1.019.113	1.365.070	1.202.335	972.105	1.297.150	978.557	3.603.235	36.300.029	49.378.007
		BELANJA MODAL	0	0	0	181	3.942	454.486	480.537	259.108	36.865	143.651	63.832	150.000	1.592.601
063.01.DR.3165		Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0	99.294	330.981	80.743	103.257	216.677	351.046	65.723	157.986	157.942	370.156	1.438.878	3.372.685
063.01.DR.4122		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	99.294	330.981	80.743	103.257	216.677	351.046	65.723	157.986	157.942	370.156	1.438.878	3.372.685
		Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	0	70.993	88.432	129.096	121.140	264.577	218.911	248.084	110.744	176.476	360.345	4.961.132	6.749.931
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	70.993	88.432	129.096	121.140	264.577	218.911	248.084	110.744	176.476	360.345	4.861.132	6.649.931
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
063.01.DR.4123		Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	0	50.179	143.406	148.528	240.960	241.497	265.777	172.368	342.504	230.871	1.604.236	7.793.350	11.233.674
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	50.179	143.406	148.347	237.018	240.091	264.902	171.416	340.789	227.219	1.580.974	7.769.333	11.173.674
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	181	3.942	1.406	875	952	1.715	3.651	23.262	24.017	60.000
063.01.DR.4125		Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	0	218.037	212.978	123.672	234.633	201.274	130.080	204.707	239.208	199.176	403.526	7.143.399	9.310.689
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	218.037	212.978	123.672	234.633	201.274	130.080	204.707	239.208	199.176	403.526	7.143.399	9.310.689
063.01.DR.4127		Registrasi Obat	0	48.968	403.720	296.167	274.162	331.109	162.148	119.286	212.970	194.785	217.493	10.394.113	12.654.921

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode>Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
063.01.DR.4131		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	48.968	403.720	296.167	274.162	331.109	162.148	119.286	212.970	194.785	217.493	10.394.113	12.654.921	
		Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	0	16.166	88.434	90.801	48.904	564.422	554.909	421.044	270.602	162.960	711.310	4.719.156	7.648.708	
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	16.166	88.434	90.801	48.904	111.342	75.247	162.888	235.452	22.960	670.740	4.693.173	6.216.107	
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	453.080	479.662	258.156	35.150	140.000	40.570	25.983	1.432.601	
		PERKIRAAN PENERIMAAN	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.110	46.129.100
		- PNBP (425321)	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.424	2.957.000
		- PNBP (425321)	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.849	34.546.100
	- PNBP (425321)	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.837	1.990.000	
	- PNBP (425321)	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	6.636.000	

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.650 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 31.338.083		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 31.315.258	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	53 Belanja Modal Rp. 22.825		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.379 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
3165.BKB	Pemantauan produk		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.921 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.260 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 341.248 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.206 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 249.320 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.020 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.319 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.825 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 176.057 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R**



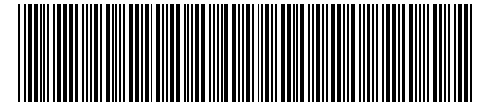
DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4122.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	4122.QAH	Pelayanan Publik Lainnya
521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 119.882	521211	Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.602
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.600	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.364
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522191	Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 212.019	4122.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521111	Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.400
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 420.594	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 259
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.680	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.464
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.077.160	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211	Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 138.924
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 399.065	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R**



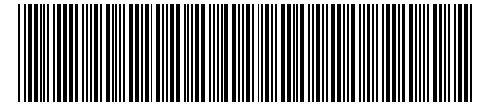
DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.000 A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 174.835 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.920 A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.640 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.900 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 231.362 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522191	Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 218.038 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.453 a Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 142.000 A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 126.644 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.000 A Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 511.012 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4123.BAH	Pelayanan Publik Lainnya
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.178 Blokir Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		521211	Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 73.897 Efisiensi

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4123.BIA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.050 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.440 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.050 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.250 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.000 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.386 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 67.976 Blokir
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 142.675 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.000 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 270.750 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 314.300 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.340 Efisiensi

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R**



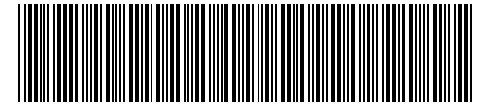
DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4123.BIB	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 107.755 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.000 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 257.066 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.955 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 74.070 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 454.168 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.098 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.050 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 101.550 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.500 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.400 Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 84.520 Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.237.209 Efisiensi

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R**



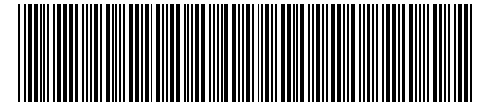
DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4123.QIA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Pengawasan dan Pengendalian Produk		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 161.700
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 400.000		Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.944		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 237.432
	Efisiensi		Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.100	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.270		
Efisiensi	Efisiensi		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.000	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.250.485		
Efisiensi	Efisiensi		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 105.698	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.239.065		
Efisiensi	Efisiensi		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)	4125 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.000	4125.BAH Pelayanan Publik Lainnya		
Efisiensi	521211 Belanja Bahan(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.379		
522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 415.687	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Efisiensi	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.278		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R**



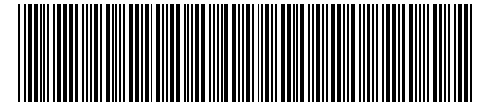
DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 134.307		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.102.932
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522141	Belanja Sewa(RM)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.525		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 209.544
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 130.100		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 950.200
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	4125.QAH	Pelayanan Publik Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 209.897	521211	Belanja Bahan(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.130	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.150
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 975.100	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.252
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 253.808	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.869

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 8
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522141	Belanja Sewa(PNBP)	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 176.160
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.000	521211	Belanja Bahan(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 384.657
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.590	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 228.080
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 463.495	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 703.950
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Registrasi Obat
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.428		Perizinan Produk
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211	Belanja Bahan(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 85.040
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.360	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 9
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4127.BAH	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 344.300 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 291.200 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522112 Belanja Langganan Telepon(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 208.440 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.082.200 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.640 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 395.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 194.680 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 92.400 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Pelayanan Publik Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R**



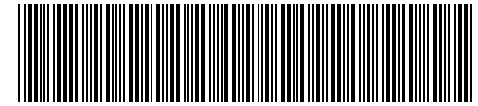
DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 10
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4127.PCA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 203.700 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		522141 Belanja Sewa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.670.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Perizinan Produk		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 106.448 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.700 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 785.784 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.534 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.689 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 61.519 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 463.465 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 547.085 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 99.086 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 11
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 186.322 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4131.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.080 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.150 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 260.595 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 307.375 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 86.700 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 927.021 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 110.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.735 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 320.915 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 162.665 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.085 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R**



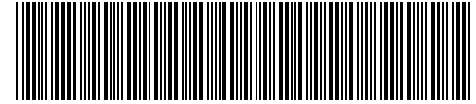
DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 12
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 367.500 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 138.414 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 456.600 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522191	Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 242.559 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 509.850 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 78.720 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 555.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.360 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4131.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 190.935 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 65.395 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4131.CAB	Sarana Bidang Kesehatan
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.800 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 780 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 13
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	<p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.045 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p>		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:7350-5336-1020-2760

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503